

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SITA EKSEKUSI ATAS HARTA BERSAMA PERKAWINAN DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2018/PA.Smn)

RIDUAN*

Pengadilan Agama juga berwenang untuk menangani kasus-kasus atau perkara-perkara perkawinan serta menangani dampak-dampaknya seperti persoalan terhadap harta bersama. Dalam menyelesaikan pembagian harta bersama, timbul masalah antara kedua belah pihak karena masing-masing atau salah satu pihak tidak mendapat apa yang seharusnya menjadi miliknya sehingga pihak yang merasa tidak rela karena haknya yang tidak diberikan akhirnya menggugat ke Pengadilan untuk dilakukan eksekusi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap sita jaminan atas harta bersama perkawinan dalam hukum positif di Indonesia, apakah terhadap sita harta bersama yang telah dinyatakan sah dan berharga dapat dilakukan sita eksekutorial dalam Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2018/PA.Smn dan bagaimana pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Agama terhadap putusan hakim mengenai harta bersama setelah perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analisis konsep hukum dan untuk memperoleh data sekunder. Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum terhadap sita jaminan atas harta bersama perkawinan dalam hukum positif di Indonesia yaitu: Pasal 190 KUHP, PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Pasal 24 ayat (2) huruf c, UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 78 huruf c, Pasal 823 Reglement of de Rechtsvordering (Rv), Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 136 ayat (2) huruf b KHI. Sedangkan terhadap sita jaminan adalah harus terdapat alasan bahwa pihak yang menguasai harta bersama tersebut akan menggelapkan atau mengalihkan harta bersama tersebut kepada pihak lain sebagaimana alasan yang termuat dalam pasal 227 ayat (1) HIR dan pasal 261 ayat (1) R.Bg. Terhadap harta bersama yang telah dinyatakan sah dan berharga dalam Putusan Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.SMN dapat dilakukan sita eksekutor dengan dikeluarkannya Putusan Sela Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn tanggal 9 Juli 2018 mengenai perintah peletakan sita jaminan terhadap sebagian obyek sengketa. Kemudian, juru sita Pengadilan Agama Sleman telah melakukan sita jaminan terhadap sebagian obyek sengketa harta bersama. Pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan agama terhadap putusan hakim mengenai harta bersama setelah perceraian harus diajukan oleh pemohon kepada ketua Pengadilan Agama agar putusan tersebut dapat dijalankan secara paksa. Tanpa ada surat permohonan tersebut maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

Kata Kunci: Sita Harta Bersama, Sita Eksekusi, Hukum Acara, Peradilan Agama

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF CONFIRMED EXECUTION OF MARRIAGE COLLECTIVE PROPERTY IN THE LAW OF PROCEDURE RELIGIOUS JUSTICE IN INDONESIA (Decision Study Number: 160/Pdt.G/2018/PA.Smn)

RIDUAN*

The Religious Courts are also authorized to handle cases or marriage cases and deal with their impacts such as problems with joint assets. In completing the distribution of joint assets, problems arose between the two parties because each or one of the parties did not receive what should have been theirs so that those who felt unwilling because their rights were not granted finally sued the Court for execution.

This study aims to determine the legal arrangements for the confiscation of collateral for marital joint assets in positive law in Indonesia, whether the confiscation of shared assets that have been declared valid and valuable can be carried out by executorial confiscation in Decision Number: 160/Pdt.G/2018/PA.Smn and how the implementation of the execution by the Religious Court of the judge's decision regarding joint assets after the divorce.

This study uses normative juridical methods through statutory approaches, case approaches and legal concept analysis approaches and to obtain secondary data. The collected data will be analyzed carefully using descriptive qualitative analysis.

The results of the study show that the legal arrangements for the confiscation of collateral for marital joint assets in positive law in Indonesia are: Article 190 of the Criminal Code, PP No. 9 of 1975 concerning the Implementation of the Marriage Law Article 24 paragraph (2) letter c, Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts Article 78 letter c, Article 823 Regulation of de Rechtsvordering (Rv), Article 95 paragraph (1) and Article 136 paragraph (2) letter b KHI. As for confiscation of collateral, there must be a reason that the party controlling the joint property will embezzle or transfer the joint property to another party as stated in article 227 paragraph (1) HIR and article 261 paragraph (1) R.Bg. Joint assets that have been declared valid and valuable in Ruling Number 160/Pdt.G/2018/PA.SMN can be confiscated by the executor by issuing Interlocutory Decision Number 160/Pdt.G/2018/PA.Smn dated 9 July 2018 regarding orders to place confiscation of guarantees against some objects of dispute. Then, the bailiff of the Sleman Religious Court had confiscated guarantees for some of the objects of the joint property dispute. The implementation of the execution by the religious court of the judge's decision regarding joint assets after the divorce must be submitted by the applicant to the chairman of the Religious Court so that the decision can be carried out by force. Without the request letter, the execution cannot be carried out.

Keywords: Confiscation of Joint Assets, Confiscation of Execution, Procedural Law, Religious Courts

*Students of the Postgraduate Program in the Law Program at the Islamic University of North Sumatra.